

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah.. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi., (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: PT. Pradnya Paramitha, 1986).
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Angkasa. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro: 2004.
- H. Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- , *Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*, Bogor: Liter Antarnusa, 2014).
- Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- L.S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993,

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan Pemerintah no.43 th 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah no.44 th 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Undang Undang Republik Indonesia no.14 th 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan KM 76 Tahun 1993 Tentang Sistem

3. Majalah

Operasi Simpatik Jaya 2009 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya”,
(Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, Edisi 32 – Juni 2009).

”Penandatanganan Kerjasama Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, (Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, Edisi 32 – Juni 2009).

“Operasi Simpatik Jaya 2009 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya”,
(Jakarta: Majalah Bulanan Polisi Edisi 32-Juni 2009).

”Penandatanganan Kerjasama Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, (Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, Edisi 32 – Juni 2009).

Marthinus Adhithya, *“Kecelakaan Lalu Lintas Karena Ulah Manusia”*,
(Bekasi: Majalah Mitra, Nomor 07, Edisi Juli 2009).

“Mengurai Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polantas”, Jurnal Pro Edisi
01-Desember 2009

